

DAMPAK PENGELOLAAN HUTAN DESA TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NEGERI OMA, MALUKU TENGAH

THE IMPACT OF VILLAGE FOREST MANAGEMENT ON THE SOCIO- ECONOMIC LIFE OF THE NEGERI OMA COMMUNITY, CENTRAL MALUKU

Alvienly Mezli Paly¹, Evelin Parera^{2*}, Iskar Iskar³

^{1,2,3} Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura. Ambon
Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka – Ambon, 97233. Indonesia

*Email Korespondensi: evlinparera@gmail.com

ABSTRAK

Program perhutanan sosial melalui skema Hutan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Namun, efektivitas dampak sosial-ekonomi program ini masih bervariasi, khususnya di wilayah kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi pengelolaan Hutan Desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di Negeri Oma, Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) melalui survei terhadap 30 responden anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), wawancara informan kunci, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Hutan Desa memberikan dampak sosial positif berupa peningkatan kebersamaan dan gotong royong masyarakat, terutama pada kelompok minyak atsiri. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih terbatas dan cenderung didominasi oleh pengurus inti kelompok. Dari aspek ekonomi, program ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan rumah tangga, melainkan hanya sebagai sumber pendapatan tambahan dengan skala usaha yang masih terbatas dan efisiensi produksi yang rendah. Faktor utama yang mempengaruhi implementasi program meliputi lemahnya kelembagaan kelompok, keterbatasan kapasitas usaha dan akses pasar, konflik tenurial terutama pada pengembangan ekowisata, serta belum optimalnya dukungan pendampingan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Hutan Desa tidak hanya ditentukan oleh akses legal pengelolaan, tetapi juga oleh penguatan kelembagaan, peningkatan skala ekonomi usaha, dan integrasi dukungan pasar secara berkelanjutan.

Kata kunci: Dampak sosial ekonomi, Hutan Desa, kelembagaan, Maluku, perhutanan sosial

ABSTRACT

The social forestry program through the Village Forest scheme aims to improve community welfare while ensuring forest sustainability. However, the socio-economic effectiveness of this program remains varied, particularly in island regions. This study aims to analyze the social and economic impacts of Village Forest management and to identify the factors influencing its implementation in Negeri Oma, Central Maluku Regency. This research employed a mixed-methods approach, involving a survey of 30 respondents from Social Forestry Business Groups (KUPS), key informant interviews, field observations, and document analysis. Data were analyzed using descriptive quantitative and qualitative approaches, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the Village Forest program has generated positive social impacts, particularly in strengthening social cohesion and mutual cooperation among community members, especially within non-timber forest product (NTFP)-based groups. However, the level of community participation remains limited and tends to be dominated by core group leaders. From an economic perspective, the program has not significantly contributed to household income, functioning only as a supplementary income source with limited business scale and low production efficiency. The main factors influencing program implementation include weak institutional capacity, limited business skills and market access, tenure conflicts—particularly in ecotourism development—and insufficient facilitation and external support. This study emphasizes that the success of Village Forest management is not solely determined by legal access to forest resources, but also by strengthening local institutions, scaling up economic activities, and ensuring sustainable market integration.

Keywords: socio-economic impact, Village Forest, institutional capacity, Maluku, social forestry

Received: 12 Februari 2026; Revised: 01 Maret 2026; Accepted: 20 Maret 2026; Published: 27 Maret 2026

Vol. 2 No. 12. Maret 2026 | **MARSEGU: Jurnal Sains dan Teknologi**

887

PENDAHULUAN

Perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berorientasi pada keberlanjutan ekologi dan peningkatan kesejahteraan. Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021, masyarakat diberikan akses legal untuk mengelola kawasan hutan melalui berbagai skema, salah satunya adalah Hutan Desa. Skema ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan, dengan harapan terciptanya keseimbangan antara fungsi ekologis dan manfaat ekonomi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi perhutanan sosial dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan, penguatan kelembagaan lokal, serta peningkatan kesadaran konservasi (Maryudi et al., 2016; Oldekop et al., 2016). Namun demikian, hasil yang dicapai di berbagai daerah menunjukkan variasi yang signifikan. Beberapa studi melaporkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sementara studi lainnya menunjukkan bahwa manfaat ekonomi masih terbatas dan partisipasi masyarakat belum optimal (Sahide et al., 2020; Fisher et al., 2018).

Namun, kajian empiris terkait efektivitas sosial-ekonomi Hutan Desa di wilayah kepulauan Maluku masih terbatas, khususnya yang mengkaji secara simultan aspek partisipasi sosial, dinamika kelembagaan, serta kinerja ekonomi usaha perhutanan sosial. Padahal, karakteristik wilayah kepulauan seperti keterbatasan akses pasar, ketergantungan pada sumber daya alam, serta kuatnya sistem adat berpotensi mempengaruhi keberhasilan implementasi program secara berbeda dibandingkan wilayah daratan.

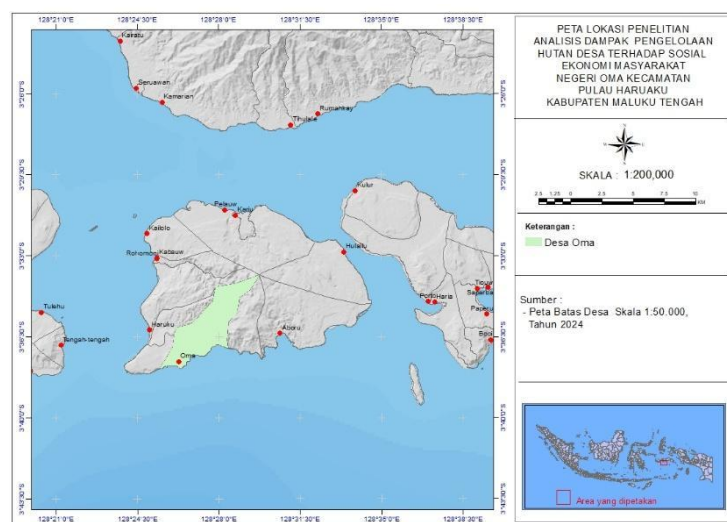
Hutan Desa Negeri Oma di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, merupakan salah satu contoh implementasi perhutanan sosial yang memiliki potensi sumber daya hutan yang cukup besar, dengan luas mencapai 860,61 ha. Pengelolaan dilakukan melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mengembangkan usaha berbasis minyak atsiri dan jasa lingkungan (ekowisata). Meskipun demikian, indikasi awal menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi program masih rendah dan partisipasi masyarakat belum merata.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari implementasi Hutan Desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam konteks lokal kepulauan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai perhutanan sosial, khususnya di wilayah timur Indonesia yang masih relatif kurang terwakili dalam kajian empiris.

METODE PENELITIAN

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan September 2025 yang berlokasi di Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.



Gambar 1. Peta lokasi Penelitian

Alat dan Objek Penelitian

Alat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini bahan yang digunakan yaitu, daftar pertanyaan (kuesioner). Sedangkan untuk alat yaitu Alat tulis menulis, kamera untuk dokumentasi kegiatan, perekam suara (recorder), dan laptop.

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), lewat kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang mengelola Hutan Desa di Negeri Oma, yaitu KUPS Pelatimu Oma dan KUPS Wai Wahana Oma.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods (campuran), yaitu mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dampak sosial-ekonomi pengelolaan Hutan Desa. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi dan kondisi ekonomi masyarakat, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dinamika kelembagaan, persepsi masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Negeri Oma yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Desa, khususnya anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria responden yang terlibat langsung dalam kegiatan KUPS Pelatimu (minyak atsiri) dan KUPS Wai Wahana (ekowisata). Jumlah responden sebanyak 30 orang, masing-masing 15 orang dari setiap kelompok.

Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap informan kunci yang terdiri dari pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), pemerintah negeri, serta pendamping perhutanan sosial untuk memperkuat analisis kualitatif.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

- Observasi, untuk mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan Hutan Desa.
- Wawancara semi-terstruktur, untuk menggali informasi mendalam terkait persepsi, partisipasi, dan kendala implementasi program.
- Kuesioner, untuk memperoleh data kuantitatif terkait karakteristik responden, tingkat partisipasi, dan kondisi ekonomi.
- Dokumentasi, untuk mengumpulkan data pendukung berupa laporan, catatan kegiatan, dan kondisi wilayah.
- Studi literatur, untuk memperoleh data sekunder dari jurnal, buku, dan kebijakan terkait perhutanan sosial.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek utama, yaitu:

- Aspek Sosial, meliputi:
 - Partisipasi masyarakat (keterlibatan dalam kegiatan, pengambilan keputusan)
 - Kohesi sosial (gotong royong, kerja sama, interaksi sosial)
 - Kelembagaan lokal (peran LPHD dan dinamika kelompok)
- Aspek Ekonomi, meliputi:
 - Tingkat pendapatan (pendapatan utama dan tambahan dari Hutan Desa)
 - Peluang usaha (pengembangan MINYAK ATSIRI dan ekowisata)
 - Akses terhadap pasar dan modal usaha

Teknik Analisis Data

- Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif dilakukan secara deskriptif statistik, yaitu dengan menghitung persentase (%) dari setiap variabel yang diamati, seperti karakteristik responden, tingkat partisipasi, dan persepsi masyarakat terhadap program Hutan Desa. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan diinterpretasikan untuk melihat kecenderungan umum di tingkat masyarakat.

b. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik, melalui tahapan sebagai berikut:

- Reduksi data: menyederhanakan dan mengelompokkan data hasil wawancara dan observasi
- Coding: mengidentifikasi tema-tema utama seperti partisipasi, kelembagaan, konflik, dan dukungan eksternal
- Penyajian data: menyusun informasi dalam bentuk narasi sistematis
- Penarikan kesimpulan: menginterpretasikan makna data untuk menjawab tujuan penelitian

Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Hutan Desa serta hubungan antara aspek sosial dan ekonomi dalam konteks lokal masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Sosial Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Hutan Desa

Dampak sosial perhutanan sosial bersifat dinamis dan kontekstual. Perbedaan kepentingan, ketimpangan akses, serta konflik tenurial dapat mempengaruhi kualitas hubungan sosial dan tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Hutan Desa melalui perhutanan sosial memerlukan pendekatan inklusif dan sensitif terhadap konteks sosial-budaya setempat, termasuk peran kelembagaan adat dan pemerintah desa. Dengan pengelolaan yang partisipatif dan adil, perhutanan sosial berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat kohesi sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan.

a. Dampak Sosial Perkembangan Kelompok Pengelola Minyak Atsiri

Pengembangan kelompok pengelola minyak atsiri dari cengkeh dan sereh dalam skema perhutanan sosial Hutan Desa memberikan dampak sosial positif yang signifikan pada tahap awal. Aktivitas pengolahan minyak atsiri secara kolektif mendorong peningkatan interaksi sosial, kerja sama, dan solidaritas antaranggota. Proses produksi gotong royong mempererat kohesi sosial serta rasa kepemilikan bersama, sejalan dengan konsep social capital yang menekankan peran

kepercayaan, norma, dan jejaring sosial dalam pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat (Pretty & Ward, 2001).

Keterlibatan anggota juga meningkatkan kapasitas sosial melalui transfer pengetahuan dan keterampilan teknis, seperti penyulingan, pengemasan, dan manajemen usaha sederhana. Hal ini membangun rasa percaya diri dan kemandirian kelompok. Usaha berbasis minyak atsiri cenderung stabil secara sosial karena minim konflik tenurial dan inklusif bagi berbagai lapisan masyarakat (Oldekop et al., 2016).

Kontribusi pada Inklusivitas dan Kesejahteraan

Kelompok ini memperkuat inklusivitas sosial dengan membuka partisipasi bagi perempuan dan anggota keluarga dalam kegiatan pascapanen dan pengemasan. Manfaat tidak terbatas pada kepala keluarga, melainkan merata ke rumah tangga secara keseluruhan, sehingga mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan komunitas (Sunderlin et al., 2019). Secara kelembagaan adat, program Hutan Desa berpotensi memperkuat struktur lokal melalui musyawarah kelompok, meski memerlukan pendampingan untuk mengelola perbedaan kepentingan (Agrawal & Gibson, 1999).

Tantangan Keberlanjutan dan Penurunan Partisipasi

Meski demikian, kelompok di Negeri Oma hanya aktif sekitar satu tahun. Operasional didominasi ketua, sementara anggota kembali ke mata pencaharian utama (nelayan, petani, tukang) karena kebutuhan harian yang mendesak. Pendapatan dari minyak atsiri tidak cukup stabil atau kompetitif, dengan skala produksi terbatas dan frekuensi rendah, sehingga tidak menjadi prioritas (Sunderlin et al., 2019).

Fenomena ini menunjukkan keberlanjutan bergantung pada manfaat ekonomi riil dibanding pekerjaan eksisting. Dominasi peran ketua mencerminkan lemahnya internalisasi kelembagaan, yang menurunkan partisipasi, komitmen kolektif, dan modal sosial, berpotensi memicu social fatigue serta stagnasi (Pretty & Ward, 2001; Colfer, 2016).

Keterlibatan masyarakat masih bergantung pendamping, dengan sosialisasi SK Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa perlu berkelanjutan agar partisipasi mandiri (Fisher et al., 2018). Secara keseluruhan, keberhasilan Hutan Desa tidak hanya dari sumber daya atau pembentukan kelompok, tapi kemampuan usaha menjawab kebutuhan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan nilai tambah, efisiensi, akses pasar, dan dukungan eksternal (Oldekop et al., 2016; Sahide et al., 2016). Tanpa strategi ini, pengelolaan berisiko menjadi individual dan subsistence-based, menyimpang dari tujuan kolektif perhutanan sosial.

b. Dampak Sosial Perkembangan Kelompok Pengelola Ekowisata Air Panas

Perkembangan kelompok pengelola ekowisata air panas menunjukkan dampak sosial yang lebih kompleks dan terbatas dibandingkan kelompok minyak atsiri. Konflik lahan, terutama akses jalan, menghambat kegiatan ekowisata, sehingga menurunkan interaksi sosial produktif antaranggota. Akibatnya, penguatan kohesi sosial dan rasa kebersamaan belum optimal, sebagaimana didukung penelitian Moeliono et al. (2014) dan Sahide et al. (2016) yang menyatakan ketidakpastian akses melemahkan motivasi usaha bersama.

Konflik lahan juga memicu fragmentasi sosial di tingkat desa akibat perbedaan kepentingan antara kelompok pengelola, pemilik lahan, dan pihak lain. Hal ini menurunkan kepercayaan antar warga serta legitimasi kelembagaan kelompok, di mana ekowisata berpotensi menjadi sumber ketegangan daripada pemberdayaan tanpa penyelesaian konflik partisipatif (Cole, 2016; Goodwin & Santilli, 2018).

Terhambatnya ekowisata membatasi peluang pembelajaran sosial melalui interaksi wisatawan, pelatihan, dan pengelolaan destinasi. Padahal, ini krusial untuk membangun kapasitas sosial, wawasan konservasi, dan kesadaran kolektif tentang pengelolaan hutan lestari (Reed et al., 2018).

Secara komparatif, kelompok minyak atsiri menghasilkan dampak sosial lebih nyata dan stabil berkat rendahnya risiko konflik, keterjangkauan usaha, dan manfaat langsung. Sebaliknya, ekowisata bergantung pada kepastian akses dan stabilitas sosial, menjadikan konflik lahan sebagai penghambat utama. Dalam perhutanan sosial, usaha berbasis minyak atsiri seperti minyak atsiri lebih efektif membangun modal sosial, sementara ekowisata memerlukan dukungan kelembagaan kuat dan tata kelola kolaboratif (Oldekop et al., 2016).

Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam program Hutan Desa di Negeri Oma belum optimal, sangat bergantung pada pendamping perhutanan sosial. Partisipasi belum mandiri, sehingga sosialisasi SK Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa perlu berkelanjutan. Secara kelembagaan sosial dan adat, program ini berpotensi memperkuat struktur lokal, tapi bergantung pada kesiapan masyarakat menjadikan SK sebagai instrumen nyata, bukan sekadar simbol. Tanpa penguatan sosial, aspek legal formal tidak substantif (Fisher et al., 2018). Program memunculkan perubahan dinamis dalam hubungan sosial, seperti peningkatan musyawarah kelompok, meski memerlukan pendampingan untuk mengelola perbedaan kepentingan—karakter umum pengelolaan sumber daya komunitas (Agrawal & Gibson, 1999).

Tantangan Kelembagaan dan Rekomendasi

Keterlibatan terbatas pada sebagian kecil anggota kelompok, dengan beberapa kelompok tidak aktif sejak awal, menunjukkan partisipasi timpang yang melemahkan efektivitas pengelolaan

(Brockhaus et al., 2021). Program belum memperkuat kelembagaan sosial kolektif karena kurangnya kerja sama. Kelembagaan adat berjalan terpisah dari Hutan Desa, meski ada individu merangkap peran, mencerminkan dualisme yang menghambat integrasi untuk legitimasi dan kepatuhan (Agrawal & Gibson, 1999; Colfer, 2016). Meski demikian, perubahan hubungan sosial pasca-implementasi menjadi modal awal yang perlu diperkuat melalui kapasitas dan kepemimpinan untuk kolaborasi solid (Putnam, 2000).

Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Program Hutan Desa

Pengetahuan masyarakat tentang tujuan, hak, dan kewajiban Hutan Desa mendorong partisipasi efektif dalam pengelolaan hutan, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, penguatan lembaga, serta pengelolaan konflik. Studi (Maryudi et al., 2016; Fisher et al., 2019; Sahide et al., 2020) membuktikan keberhasilan perhutanan sosial bergantung pada pemahaman dan rasa kepemilikan masyarakat, menjamin keberlanjutan fungsi sosial, ekonomi, dan ekologis. Hasil penelitian pengetahuan responden dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengetahuan masyarakat tentang Hutan Desa

Opsi Jawaban	Pengelola Minyak Atsiri (n=15)	Pengelola Ekowisata (n=15)
Ya	14 (93,3%)	13 (86,7%)
Tidak	1 (6,7%)	2 (13,3%)
Total	100%	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2025

Mayoritas responden dari kelompok minyak atsiri dan wisata mengetahui program Hutan Desa ($\geq 86\%$), menandakan sosialisasi perhutanan sosial di Negeri Oma berhasil menjangkau masyarakat sasaran, sejalan dengan kebijakan KLHK (2016; 2021). Namun, keterlibatan aktif masih timpang, terutama pada kelompok wisata dengan proporsi tidak terlibat lebih tinggi daripada minyak atsiri. Hal ini mengkonfirmasi studi sebelumnya bahwa partisipasi bersifat selektif, didominasi kelompok berakses manfaat ekonomi (Maryudi et al., 2016; Sahide et al., 2020). Meski pengetahuan tinggi, partisipasi belum merata.

Penguatan Kebersamaan dan Gotong Royong

Penguatan kebersamaan dan gotong royong merupakan salah satu dampak sosial yang diharapkan dari implementasi Program Hutan Desa, mengingat pengelolaan hutan berbasis masyarakat menuntut adanya kerja kolektif, kepercayaan, dan solidaritas antar anggota komunitas. Melalui aktivitas bersama seperti perencanaan pengelolaan, pemanfaatan hasil hutan, serta pemeliharaan kawasan, Hutan Desa berpotensi menjadi ruang sosial yang mempererat hubungan antar warga dan memperkuat modal sosial lokal. Meskipun pada praktiknya penguatan sosial tersebut seringkali belum merata dan masih terbatas pada kelompok yang aktif terlibat (Purnomo et al., 2019;

Sahide et al., 2020; Callegari & Nybakk, 2022). Hasil penelitian seperti pada Tabel 2, tentang persepsi Responden terhadap Penguatan Kebersamaan dan Gotong Royong

Tabel 2. Persepsi Responden terhadap penguatan kebersamaan dan gotong royong

Opsi Jawaban	Pengelola Minyak Atsiri (%)	Pengelola Ekowisata (%)
Ya	80,0	66,7
Tidak	20,0	33,3
Total	100	100

Hasil pada Tabel 2 tentang persepsi responden terhadap Penguatan Kebersamaan dan Gotong Royong. menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada kedua kelompok menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa program Hutan Desa memperkuat kebersamaan dan gotong royong. Hal ini mengindikasikan bahwa Hutan Desa berperan sebagai ruang sosial yang mendorong interaksi kolektif dan kerja sama antarwarga. Namun, masih adanya responden yang bersikap netral dan tidak setuju mencerminkan bahwa manfaat sosial tersebut lebih banyak dirasakan oleh anggota yang aktif, sementara anggota pasif belum sepenuhnya terintegrasi dalam dinamika kelompok.

Kelembagaan Sosial dan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Berdasarkan Tabel 3, persepsi Responden terhadap Kelembagaan Sosial dan Partisipasi, kinerja kelembagaan LPHD di Negeri Oma dinilai cukup hingga baik oleh mayoritas responden, meskipun masih terdapat proporsi responden yang menilai kelembagaan kurang berjalan optimal. Penilaian ini mencerminkan bahwa LPHD telah berfungsi sebagai wadah formal pengelolaan Hutan Desa, tetapi belum sepenuhnya mampu mengonsolidasikan seluruh anggota kelompok.

Tabel 3. Persepsi responden terhadap kelembagaan sosial dan partisipasi

Opsi Jawaban	Pengelola Minyak Atsiri	Pengelola Ekowisata
Baik	7 (46,7%)	6 (40,0%)
Cukup	4 (26,7%)	5 (33,3%)
Kurang	3 (20,0%)	3 (20,0%)
Tidak tahu	1 (6,6%)	1 (6,7%)
Total	100%	100%

Lebih lanjut, Tabel 3 menunjukkan bahwa keterlibatan responden dalam pengambilan keputusan masih terbatas, dengan sekitar 40–47% responden merasa tidak dilibatkan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kelembagaan perhutanan sosial sering kali masih bersifat elitis, di mana pengambilan keputusan didominasi oleh pengurus inti (Maryudi et al., 2016; Myers et al., 2018). Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan rasa memiliki (sense of ownership) anggota terhadap program Hutan Desa.

Kearifan Lokal dan Nilai Adat dalam Pengelolaan Hutan Desa

Kearifan lokal dan nilai adat memiliki peran strategis dalam pengelolaan Hutan Desa, terutama di wilayah yang masih kuat mempertahankan sistem sosial dan budaya tradisional. Nilai-nilai adat, seperti aturan pemanfaatan sumber daya, mekanisme sanksi sosial, dan praktik konservasi berbasis tradisi, menjadi landasan penting dalam mengatur hubungan masyarakat dengan kawasan hutan secara berkelanjutan.

Tabel 4. Persepsi responden terhadap Integrasi Kearifan Lokal (Sasi)

Opsi Jawaban	Pengelola Minyak Atsiri	Pengelola Ekowisata
Ya	12 (80,0%)	13 (86,7%)
Tidak	1 (6,7%)	1 (6,7%)
Tidak tahu	2 (13,3%)	1 (6,6%)
Total	100%	100%

Hasil Tabel 4, persepsi responden terhadap Integrasi Kearifan Lokal (Sasi). menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai pengelolaan Hutan Desa di Negeri Oma telah memperhatikan kearifan lokal, khususnya praktik adat sasi. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara sistem pengelolaan formal negara dengan sistem adat lokal, yang merupakan salah satu prinsip utama perhutanan sosial di Indonesia (KLHK, 2016; KLHK, 2021).

Secara keseluruhan, dampak sosial program Hutan Desa di Negeri Oma menunjukkan bahwa kelompok pengelola minyak atsiri memiliki tingkat partisipasi sosial yang lebih konsisten karena aktivitas produksi yang berkelanjutan, sementara kelompok wisata lebih menonjol dalam aspek interaksi sosial dan jejaring, tetapi menghadapi tantangan keberlanjutan partisipasi. Pola ini menegaskan bahwa dampak sosial perhutanan sosial sangat dipengaruhi oleh jenis usaha, intensitas aktivitas kelompok, dan kekuatan kelembagaan lokal (Sahide et al., 2020).

2. Dampak Ekonomi Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Hutan Desa

Dampak ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dari implementasi Perhutanan Sosial dalam skema pengelolaan Hutan Desa, karena program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari. Oleh karena itu, dampak ekonomi Perhutanan Sosial tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan semata, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan dalam kerangka pengelolaan Hutan Desa (Maryudi et al., 2016; Fisher et al., 2019; Sahide et al., 2020).

a. Pengelolaan Minyak Atsiri

Minyak Cengkeh

Produksi minyak cengkeh dilakukan sebanyak satu kali dalam setahun, dengan hasil produksi sebesar 1 liter minyak cengkeh yang dikemas menjadi 200 botol. Total biaya produksi

mencapai Rp 4.295.000, yang terdiri atas biaya bahan baku cengkeh sebesar Rp595.000, biaya botol dan pengemasan sebesar Rp3.200.000, serta biaya bahan bakar kayu bakar sebesar Rp500.000. Struktur biaya ini menunjukkan bahwa komponen terbesar biaya produksi berasal dari pengemasan, yang mencerminkan orientasi produk pada pasar konsumen akhir.

Pendapatan yang diperoleh dari penjualan minyak cengkeh sebesar Rp4.000.000 per tahun, dengan harga jual Rp20.000 per botol. Dengan demikian, secara nominal usaha minyak cengkeh menunjukkan margin ekonomi yang sangat tipis, bahkan cenderung belum menutup seluruh biaya produksi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun produk memiliki nilai tambah, skala produksi dan efisiensi biaya masih menjadi tantangan utama.

Minyak Sereh

Produksi minyak sereh dilakukan tiga kali dalam setahun, dengan hasil produksi sebesar 600 ml per siklus produksi. Setiap produksi menghasilkan 120 botol, sehingga total produksi tahunan mencapai 360 botol. Total biaya produksi per siklus sebesar Rp2.420.000, yang terdiri atas biaya botol dan pengemasan sebesar Rp1.920.000 serta biaya bahan bakar kayu bakar sebesar Rp500.000. Bahan baku sereh tidak dihitung sebagai biaya karena berasal dari sumber lokal yang tersedia di kawasan hutan desa.

Pendapatan per siklus produksi minyak sereh mencapai Rp 2.400.000, dan total pendapatan tahunan sebesar Rp7.200.000. Dibandingkan dengan minyak cengkeh, minyak sereh menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih baik, terutama karena frekuensi produksi yang lebih tinggi dan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan.

b. Pengelolaan Ekowisata

Pengelolaan ekowisata air panas dalam skema Perhutanan Sosial Hutan Desa belum berkembang secara optimal akibat adanya konflik lahan, khususnya terkait status dan akses jalan menuju lokasi wisata. Dalam konteks pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, konflik lahan tidak hanya berdampak pada aspek fisik pembangunan, tetapi juga pada dinamika sosial dan kelembagaan kelompok. Ketika akses jalan menjadi sumber konflik, tingkat partisipasi masyarakat cenderung menurun karena munculnya ketidakpercayaan dan perasaan ketidakadilan antar pihak. Hal ini berdampak langsung pada melemahnya kohesi sosial dan rendahnya komitmen kolektif dalam mengembangkan ekowisata sebagai usaha bersama

Dari sisi ekonomi, keterbatasan akses jalan akibat konflik lahan menyebabkan rendahnya jumlah kunjungan wisatawan, meningkatnya biaya operasional, serta minimnya peluang investasi untuk pengembangan fasilitas pendukung ekowisata. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kontribusi ekowisata terhadap pendapatan kelompok dan kesejahteraan masyarakat desa. Padahal, ekowisata dalam skema perhutanan sosial dirancang sebagai strategi diversifikasi mata pencaharian yang mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemanfaatan hutan secara ekstraktif.

Ketika konflik lahan tidak diselesaikan, potensi ekonomi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan justru berisiko memicu kembali tekanan terhadap sumber daya hutan (Oldekop et al., 2016).

3. Faktor – Faktor yang mempengaruhi implementasi Hutan Desa di Negeri Oma

Implementasi Hutan Desa di Negeri Oma dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, mencakup aspek sosial-demografis, ekonomi rumah tangga, kelembagaan kelompok, tenurial, serta dukungan eksternal. Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data lapangan, faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Faktor Sosial dan Karakteristik Masyarakat

Komposisi masyarakat pengelola Hutan Desa di Negeri Oma didominasi oleh penduduk usia produktif (15–64 tahun) dengan tingkat pendidikan mayoritas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kondisi ini memberikan potensi tenaga kerja yang cukup, namun sekaligus membatasi kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha yang memerlukan keterampilan manajerial, perencanaan bisnis, dan pengembangan pasar. Struktur sosial berbasis kekerabatan dan adat di Negeri Oma berkontribusi pada kuatnya modal sosial berupa gotong royong dan rasa saling percaya. Namun, modal sosial ini belum sepenuhnya terkonversi menjadi kerja kolektif yang berkelanjutan, terutama ketika manfaat ekonomi yang dihasilkan belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga anggota.

Faktor Ekonomi Rumah Tangga dan Mata Pencarian

Sebagian besar masyarakat Negeri Oma memiliki pendapatan di bawah upah minimum regional dan menggantungkan hidup pada mata pencarian utama seperti nelayan, petani, dan tukang. Kondisi ekonomi ini sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Desa. Kelompok pengelola minyak atsiri, meskipun secara teknis mampu memproduksi, hanya berjalan aktif selama satu tahun dan didominasi oleh peran ketua kelompok. Anggota lainnya kembali fokus pada pekerjaan utama karena pengelolaan minyak atsiri dinilai belum mampu menanggulangi kebutuhan ekonomi rumah tangga sehari-hari.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Hutan Desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan usaha perhutanan sosial dalam memberikan manfaat ekonomi yang cepat, stabil, dan kompetitif dibandingkan mata pencarian eksisting. Studi menunjukkan bahwa ketika manfaat ekonomi belum dirasakan secara langsung, partisipasi masyarakat dalam perhutanan sosial cenderung menurun (Oldekop et al., 2016; Sahide et al., 2016).

Faktor Kelembagaan dan Dinamika Kelompok

Pembentukan kelompok pengelola merupakan prasyarat utama dalam implementasi Hutan Desa, namun efektivitas kelembagaan di Negeri Oma masih bervariasi. Kelompok pengelola minyak atsiri menunjukkan kelemahan dalam internalisasi kelembagaan, ditandai dengan ketergantungan

pada satu aktor (ketua kelompok) dan rendahnya keterlibatan anggota. Kondisi ini mencerminkan belum terbangunnya sistem pembagian peran, insentif, dan tanggung jawab yang adil dalam kelompok. Sementara itu, kelompok pengelola ekowisata air panas mengalami stagnasi akibat konflik lahan dan ketidakpastian akses, sehingga aktivitas kelompok tidak berjalan optimal. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa kelembagaan yang lemah dan tidak adaptif menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi perhutanan sosial, terutama dalam pengembangan usaha kolektif (Reed et al., 2018). Penelitian terdahulu menegaskan bahwa kelembagaan yang lemah dan tidak adaptif menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi perhutanan sosial, terutama dalam pengembangan usaha kolektif (Reed et al., 2018; Maryudi et al., 2016; Sahide et al., 2016; Fisher et al., 2018; Sahide et al., 2020; Myers et al., 2018). Dalam perspektif institutional capacity, kelemahan ini mencerminkan rendahnya kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, mendistribusikan peran secara adil, serta membangun mekanisme koordinasi yang efektif. Kapasitas kelembagaan tersebut dipengaruhi oleh dimensi tata kelola, jejaring kolaborasi, dan pembelajaran sosial dalam kelompok (Fisher et al., 2018; Larson et al., 2018). Ketika kapasitas ini tidak berkembang secara adaptif, proses collective action menjadi tidak optimal, ditandai dengan partisipasi yang tidak merata, dominasi aktor tertentu, serta lemahnya legitimasi kelembagaan di tingkat lokal (Myers et al., 2018; Reed et al., 2018).

Dalam konteks perhutanan sosial, kelembagaan yang lemah juga berdampak langsung terhadap kinerja ekonomi usaha berbasis hutan. Keterbatasan akses terhadap informasi, teknologi, dan pasar menyebabkan usaha tidak berkembang secara efisien dan berkelanjutan, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga menjadi terbatas (Sahide et al., 2020; Rachmatsyah, 2025). Sebaliknya, penguatan kelembagaan yang inklusif dan adaptif terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong pengembangan usaha kolektif yang lebih produktif (Cohen & McCarthy, 2022; Fisher et al., 2019). Dengan demikian, kapasitas kelembagaan berperan sebagai faktor kunci yang memediasi hubungan antara aspek sosial (partisipasi dan kohesi) dan aspek ekonomi (kinerja usaha), sehingga penguatannya menjadi prasyarat utama dalam meningkatkan efektivitas program Hutan Desa dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Jamasy et al. 2025).

Faktor Tenurial dan Konflik Lahan

Faktor tenurial menjadi salah satu penghambat paling signifikan dalam implementasi Hutan Desa di Negeri Oma. Konflik lahan, khususnya terkait akses jalan menuju lokasi ekowisata air panas, menghambat pengembangan usaha jasa lingkungan dan menurunkan partisipasi masyarakat. Ketidakjelasan status lahan dan hak akses menciptakan ketidakpastian berusaha, sehingga masyarakat enggan berinvestasi tenaga dan waktu dalam kegiatan ekowisata. Kepastian tenurial merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan perhutanan sosial karena memberikan rasa aman bagi

masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan (Moeliono et al., 2014). Tanpa penyelesaian konflik lahan secara partisipatif dan adil, implementasi Hutan Desa berpotensi berjalan tidak optimal (Larson et al., 2018; Mwangi & Wardell, 2012; Bennett et al., 2021; Oldekop et al., 2016; Daw et al., 2016).

Faktor Dukungan Eksternal dan Pendampingan

Implementasi Hutan Desa di Negeri Oma juga dipengaruhi oleh terbatasnya dukungan eksternal, baik dalam bentuk pendampingan teknis, penguatan kapasitas usaha, maupun fasilitasi akses pasar. Kelompok pengelola minyak atsiri dan ekowisata masih menghadapi keterbatasan dalam peningkatan skala usaha dan diversifikasi produk. Beberapa stakeholders yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Hutan Desa di Negeri Oma dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Dari aspek kelembagaan, LPHD dinilai belum solid karena hanya sebagian kecil pengurus yang aktif mengelola usaha, meskipun ketersediaan bahan baku sangat mencukupi. Lemahnya kohesi kelembagaan ini menjadi tantangan utama dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Ostrom, 1990).

Dukungan kebijakan dan teknis dari pemerintah dinilai masih berlangsung, Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pengembangan usaha, khususnya pada aspek pelabelan produk, peningkatan kualitas, dan fasilitasi kemitraan pasar. Hal ini menunjukkan perlunya pergeseran fokus dari pendampingan administratif ke pendampingan berbasis penguatan rantai nilai (Sunderlin et al., 2005). Peran adat melalui praktik sasi memiliki implikasi ganda. Di satu sisi mendukung konservasi, namun di sisi lain membatasi ketersediaan bahan baku minyak atsiri, sehingga diperlukan dialog dan kesepakatan bersama agar kepentingan konservasi dan ekonomi dapat berjalan seimbang (Colfer, 2016).

Dari aspek inklusivitas, partisipasi perempuan diakui memiliki potensi besar, khususnya dalam pengolahan minyak atsiri, namun belum terwadahi secara optimal karena dominasi laki-laki dalam struktur pengelolaan. Kondisi ini sejalan dengan Agarwal (2010) yang menekankan pentingnya peran perempuan dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, konflik kepentingan antara Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan Pemerintah Desa menjadi faktor penghambat implementasi, meskipun konflik lahan relatif tidak signifikan. Ketidaksinkronan ini menunjukkan lemahnya integrasi Hutan Desa dalam tata kelola pembangunan desa (Ribot & Larson, 2005).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program Hutan Desa di Negeri Oma dapat disimpulkan : Dampak sosial lebih nyata dibandingkan dampak ekonomi. Secara sosial, program ini mampu meningkatkan kohesi sosial masyarakat, terutama dalam bentuk gotong royong dan interaksi

antaranggota kelompok. Namun, tingkat partisipasi masih terbatas dan cenderung didominasi oleh pengurus inti, yang mengindikasikan belum optimalnya internalisasi kelembagaan dan distribusi peran dalam kelompok. Dampak aspek ekonomi, program Hutan Desa belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan rumah tangga. Usaha berbasis hasil hutan bukan kayu (minyak atsiri), seperti minyak cengkeh dan minyak sereh, masih berada pada skala usaha kecil dengan efisiensi produksi yang rendah, bahkan pada beberapa kasus belum mampu menutup biaya produksi. Sementara itu, pengembangan ekowisata belum berjalan optimal akibat konflik tenurial dan keterbatasan akses, sehingga belum memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Faktor utama yang mempengaruhi implementasi Hutan Desa meliputi kelemahan kelembagaan kelompok, keterbatasan kapasitas usaha dan akses pasar, konflik lahan khususnya pada pengembangan ekowisata, serta belum optimalnya dukungan pendampingan dan integrasi program dengan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, B. 2010. *Gender and green governance*. Oxford University Press.
- Agrawal, A., & Gibson, C. 1999. *Enchantment and disenchantment: The role of community in natural resource conservation*. *World Development*, 27(4), 629–649.
- Bennett, N. J., Blythe, J., White, C. S., & Campero, C. 2021. *Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy*. *Marine Policy*, 125, 104387. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104387>
- Brockhaus, M., Di Gregorio, M., Djoudi, H., Moeliono, M., Pham, T. T., & Wong, G. Y. 2021. *The forest frontier in the Global South: Climate change policies and the promise of development and equity*. *Ambio*, 50(12), 2238-2255.
- Callegari, B., & Nybakk, E. 2022. *Schumpeterian theory and research on forestry innovation and entrepreneurship: The state of the art, issues and an agenda*. *Forest Policy and Economics*, 138, 102720. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102720>
- Cole, S. 2016. *Tourism, culture and development: Hopes, dreams and realities in East Indonesia*. Channel View Publications.
- Colfer, C. J. P. 2016. *Responding to Environmental Issues through Adaptive Collaborative Management*.
- Daw, T. M., Hicks, C. C., Brown, K., Chaigneau, T., Januchowski-Hartley, S., Cheung, W. W. L., & McClanahan, T. R. 2016. *Elasticity in ecosystem services: Exploring the variable relationship between ecosystems and human well-being*. *Ecology and Society*, 21(2), 11. <https://doi.org/10.5751/ES-08173-210211>

- Fisher, M. R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi, A., Kamaluddin, & Judda, J. 2018. *Assessing the new social forestry project in Indonesia: Recognition, livelihood and conservation?* International Forestry Review, 20(3), 346–361. <https://doi.org/10.1505/146554818824063014>
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). *Community-based tourism: A success?* ICRT Occasional Paper No. 11. International Centre for Responsible Tourism.
- Jamasy, O., Pranoto, Y., & Yasin, A. P. 2025. Konsep Dan Model Pendampingan Berkelanjutan Untuk Organisasi Berbasis Masyarakat. PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang perhutanan sosial. KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Roadmap perhutanan sosial 2020–2024. KLHK.
- Larson, A. M., Monterroso, I., Liswanti, N., Herawati, T., Banana, A. Y., & Wollenberg, E. 2018. *Gender lessons for climate initiatives: A comparative study of REDD+ impacts on subjective wellbeing.* World Development, 108, 86–102. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.03.001>
- Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufanyi Movuh, M. C., Aurenhammer, H., & Krott, M. 2016. *Back to basics: Considerations in evaluating the outcomes of community forestry.* Forest Policy and Economics, 62, 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.10.017>
- Moeliono, M., Gallemore, C., Santoso, L., Brockhaus, M., & Di Gregorio, M. 2014. *Information networks and power: Confronting the “wicked problem” of REDD+ in Indonesia.* Ecology and Society, 22(2), 9. <https://doi.org/10.5751/ES-08900-220209>
- Mwangi, E., & Wardell, A. 2012. *Multi-level governance of forest resources.* Ecology and Society, 17(4), 14. <https://doi.org/10.5751/ES-05288-170414>
- Myers, R., Larson, A. M., Ravikumar, A., Yang, A., Trench, T., & Sanders, A. 2018. *Messiness of forest governance: How technical approaches suppress politics in REDD+ and conservation projects.* Global Environmental Change, 50, 142–152. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.02.015>
- Oldekop, J. A., Holmes, G., Harris, W. E., & Evans, K. L. 2016. *A global assessment of the social and conservation outcomes of protected areas.* Conservation Biology, 30(1), 133–141. <https://doi.org/10.1111/cobi.12568>
- Ostrom, E. 1990. *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action.* Cambridge University Press.
- Pretty, J., & Ward, H. 2001. *Social capital and the environment.* World Development, 36(2), 209–227.

- Purnomo, H., Okarda, B., Shantiko, B., Achdiawan, R., Dermawan, A., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A. A. 2019. *Forest and land fires, toxic haze and local politics in Indonesia*. International Forestry Review, 21(4), 486-500.
- Putnam, R. D. 2000. *Bowling alone: The collapse and revival of the American community*. Simon & Schuster.
- Rachmatsyah, T. H. 2025. *Pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi untuk optimalisasi UMKM sebagai pilar utama ekonomi Indonesia*. ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 8(1), 164-173.
- Reed, M. S., Vella, S., Challies, E., de Vente, J., Frewer, L., Hohenwallner-Ries, D., & van Delden, H. 2018. *A theory of participation: What makes stakeholder and public engagement in environmental management work?* Restoration Ecology, 26(S1), S7–S17. <https://doi.org/10.1111/rec.12541>
- Ribot, J. C., & Larson, A. M. 2005. *Democratic decentralization through a natural resource lens*. Routledge.
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Erbaugh, J. T., Intarini, D., Dharmiasih, Makmur, M., Faturachmat, F., Verheijen, B., & Maryudi, A. 2020. *The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia*. Forest Policy and Economics, 120, 102290.
- Sahide, M. A. K., Supratman, S., Maryudi, A., Kim, Y. S., & Giessen, L. 2016. *Decentralisation policy as recentralisation strategy: Forest management units and community forestry in Indonesia*. International Forestry Review, 22(1), 78–95. <https://doi.org/10.1505/146554820829523563>
- Sunderlin, W. D., Angelsen, A., Belcher, B., Burgers, P., Nasi, R., Santoso, L., & Wunder, S. 2005. *Livelihoods, forests, and conservation in developing countries*. World Development, 33(9), 1383–1402.